BAB III
OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian pada Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang berlokasi di Jalan Diponogoro No. 22 Bandung. Objek dari penelitian ini adalah Pengaruh akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* dan kinerja Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini yang merupakan subjek penelitian adalah individu-individu yang terkait dengan pelaksanaan Akuntabilitas terhadap peningkatan kinerja .

3.1.1 Sejarah Singkat Sekretariat Provinsi Jawa Barat

Sejarah menceritakan bahwa Sekretariat Provinsi Jawa Barat atau nama yang sudah kita kenal dengan nama Gedung Sate sejak tahun 1980 dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur karena sebagai pusat kegiatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang sebelumnya Pemerintahaan Propinsi Jawa Barat menempati Gedung Kerta Mukti di Jalan Braga Bandung.

Ruang kerja Gubernur terdapat di lantai II bersama dengan ruang kerja Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Assisten dan Biro. Saat ini Gubernur di bantu oleh tiga Wakil Gubernur yang menangani Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Bidang Kesejahteraan Rakyat, seorang Sekretaris Daerah dan Empat Asisten yaitu Asisten Ketataprajaan, Asisten Administrasi Pembangunan, Asisten Kesejahteraan Sosial dan Asisten Administrasi.

Namun tidak seluruh Asisten menempati Gedung Sate. Asisten Kesejahteraan Sosial dan Asisten Administrasi bersama staf menempati Gedung Baru. Di bagian timur dan barat terdapat dua ruang besar yang akan mengingatkan pada ruang dansa *(ball room)* yang sering terdapat

pada bangunan masyarakat Eropa. Ruangan ini lebih sering dikenal dengan sebutan aula barat dan aula timur, sering digunakan kegiatan resmi. Di sekeliling kedua aula ini terdapat ruangan-ruangan yang ditempati beberapa Biro dengan Stafnya.

Paling atas terdapat lantai yang disebut Menara Gedung Sate, lantai ini tidak dapat dilihat dari bawah, untuk menuju ke lantai teratas menggunakan Lift atau dengan menaiki tangga kayu.

Kesempurnaan megahnya Gedung Sate dilengkapi dengan Gedung Baru yang mengambil sedikit gaya arsitektur Gedung Sate namun dengan gaya konstektual hasil karya arsitek Ir.Sudibyo yang dibangun tahun 1977 diperuntukkan bagi para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Legislatif Daerah.

3.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 20 Tahun 2008, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Humas, Protokol, dan Umum memiliki struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

1. Bagian hubungan masyarakat, membawahkan :
    1.1 Sub bagian publikasi
    1.2 Sub bagian pelayanan Internal dan Eksternal
2. Bagian protokol, Tata usaha dan Kepegawaian, membawahkan :
    2.1 Sub bagian protokol
    2.2 Sub bagian Tata Usaha
    2.3 Sub bagian kepegawaian Sekretariat Daerah
3. Bagian Sandi dan telekomunikasi dengan membawahkan :
    3.1 Sub bagian Administrasi Telekomunikasi
    3.2 Sub bagian sarana Telekomunikasi
4. Bagian rumah Tangga dengan membawahkan :
    4.1 Sub bagian Rumah Tangga Setda

4.2 Sub bagian Rumah Tangga Pimpinan

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas, Protokol, dan Umum

Tugas Pokok : Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Biro Humas, Protokol, dan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitas, pemantauan serta evaluasi hubungan masyarakat, protokol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta kepegawaian.

Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Biro Humas, Umum, dan protokol mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat, protokol, tata usaha, dan kepegawaian, sandi, telekomunikasi serta rumah tangga.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas hubungan masyarakat, protokol, tata usaha, dan kepegawaian, sandi, telekomunikasi serta rumah tangga.
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi hubungan masyarakat, protokol, tata usaha, dan kepegawaian, sandi, telekomunikasi serta rumah tangga.

Adapun rincian tugas Biro Humas, Protokol dan Umum adalah :

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Humas, Protokol dan Umum
2. Merumuskan bahan kebijakn umum dan koordinasi serta fasilitas hubungan masyarakat, protokol, tata

usaha dan kepegawaian, sandi telekomunikasi serta rumah tangga.

3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan masyarakat.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dibidang protokol, tata usaha dan kepegawaian
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dibidang sandi dan telekomunikasi.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dibidang rumah tangga.
7. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi dibidang hubungan masyarakat, protokol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga.
8. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro
9. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LPPD dan LKPJ Biro.
10. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan.
11. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
12. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.1.4 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Biro Humas, Umum dan Protokol secara keseluruhan adalah sejumlah 455 orang PNS

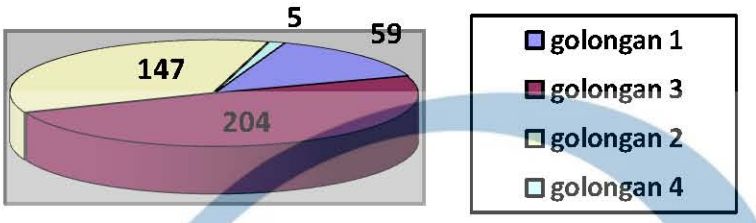

Grafik 3.1 kondisi Kepegawaian

Dari data diatas terlihat bahwa sebagian besar PNS didominasi oleh golongan III dengan jumlah 204 orang.

3.1.5 Visi, Misi Jangka Menengah Biro Humas, Protokol dan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2009, maka ditetapkan bahwa Visi dan Misi pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu :

Visi

"Tercapainya Masyarakat jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera"

Misi

1) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi pemantauan serta evaluasi pelayanan Informasi Internal dan Eksternal serta Publikasi.
2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi pemantauan serta evaluasi protocol, tata usaha,serta pengelolaan Administrasi kepegawaian Sekretariat daerah.
3) Menyelenggarakan, koordinasi dan fasilitas pemantauan serta evaluasi administrasi dan sarana telekomunikasi

4) Menyelenggarakan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi, pelayanan Rumah Tangga Pimpinan dan rumah Tangga Sekretariat Daerah.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Pendekatan studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

3.2.1 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2006:72) :

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Dalam setiap penelitian, terlebih dahulu harus ditetapkan populasi sasaran. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benat representatif agar dapat menggambarakan populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini adalah di bagian Biro Umum, Humas dan Protokol.

3.2.2 Tehnik Pengumpulan sample

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

   Untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini terutama dalam rangka pembahasan di dalam penerapannya, penelitian ini dilakukan dengan mendatangi dan meneliti secara langsung objek penelitian.

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah :

   a. Observasi

      Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atas objek yang penulis teliti.

   b. Wawancara

      Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan bagian yang terlibat langsung dalam masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh data yang memadai untuk dianalisis.

   c. Kuesioner

      Penulis melakukan pengumpulan data kuesioner yang merupakan daftar pernyataan yang logis yang berhubungan dengan masalah yang terkait dengan subjek yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan pengertian serta dipergunakan sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan yang sebenarnya.

3. Data Sekunder

   Penelitian ini juga dilakukan dengan pencarian data melalui internet.

3.2.3 Operasional Variabel

Operasional variabel yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian agar dapat diukur dan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian.

Sesuai dengan judul "Pengaruh akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* terhadap peningkatan kinerja Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekda Jabar", variabel – variabel yang terkait ini adalah sebagai berikut :

1) Akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* (variabel X)
2) Kinerja Biro Humas, Protokol, dan Umum (variabel Y)

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Pengukuran	Instrumen
Akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good governance* (X)	• Akuntabilitas keuangan	• Integritas keuangan • Pengunkapan • Ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan	ordinal	kuesioner
	• Akuntabilitas Manfaat	• Hasil kegiatan yang dilaksankan • Kebijakan mencapai hasil kegiatan	ordinal	kuesioner

	• Akuntabilitas Prosedural	• Penetapan prosedur kebijakan • Pelaksanaan suatu kebijakan	ordinal	kuesioner
Kinerja Biro Humas, protocol, dan Umum (Y)	• Efektivitas Kinerja	• Ketercapaian sasaran	ordinal	kuesioner
	• Efisiensi Kinerja	• Program kerja • Anggran belanja	ordinal	kuesioner
	• Pertumbuhan Karyawan	• Pengetahuan • Kemampuan • Karir	ordinal	kuesioner
	• Kepuasan Pelanggan (masyarakat)	• Kualitas palayanan • Penyedia informasi • Keluhan	ordinal	kuesioner

Sumber / Referensi : Akuntabilitas dan good governance (2000:24), pedoman akuntabilitas kinerja, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3.2.4 Skala Pengukuran

Skala pengukuran menurut **(Sugiyono 2006:84):**

"Merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif".

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan tipe skala *likert*.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, yang untuk keperluan kuantitatif, maka jawaban tersebut dapat diberi skor sebagai berikut :

Tabel 3.2

Bobot Skorsing

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.2.5 Alat Analisis

Untuk menghindari hal-hal yang bisa meragukan keabsahan hasil penelitian maka data yang diperoleh melalui kuestioner, perlu dilakukan pengujian instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan untuk memastikan apakah Akuntabilitas ditinjau dari Konsep Good Governance terhadap Peningkatan Kinerja telah memadai atau tidak memadai, maka pengujian

dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *rank spearman*. Uji Akuntabilitas terhadap Peningkatan Kinerja dilakukan dengan mengkuadratkan hasil dari uji hubungan korelasi *rank spearman* atau dengan menggunakan koefisien determinasi (r^2).

3.2.5.1 Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid yang artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya, suatu instrumen yang tidak valid mempunyai validitas yang rendah. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud

Validitas kuesioner diuji dengan menggunakan pengujian *construct validity* dengan teknik item analisis faktor yang merupakan pengujian karakteristik masing-masing item yang menjadi bagian instrumen yang bersangkutan. Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total

Rumus korelasi *product moment* yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini adalah

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - \left(\sum x_i\right)\left(\sum y_i\right)}{\sqrt{\left\{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2\right\}\left\{n\sum y_i^2 - \left(\sum y_i\right)^2\right\}}}$$

Hasil korelasi masing-masing item kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya (r tabel), apabila nilai korelasi item lebih besar dari nilai kritis, maka item tersebut dinyatakan valid, dan apabila nilai korelasi item lebih kecil dari nilai kritis maka item tersebut dinyatakan tidak valid dan harus dihilangkan dalam pengelolaan data selanjutnya.

3.2.5.1 Uji Reabilitas

Menurut **Masri Singarimbun (1995:140) :**

"Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan".

Jika suatu alat pengukuran digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukuran tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama .

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *internal consistency* yaitu pengujian yang dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Teknik yang digunakan adalah teknik belah dua (*split half*) dari *spearman brown* dengan langkah kerja sebagai berikut :

a. Membagi item pertanyaan menjadi dua belah yaitu item ganjil dan genap
b. Skor untuk masing-masing item pada belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden
c. Mengkoreksikan skor total belahan pertama dengan skor total belahan kedua dengan menggunakan korelasi *product moment.*

Mencari reliabilitas untuk keseluruhan pernyataan dengan rumus sebagian berikut :

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

Di mana,

r_1 = reliabilitas internal seluruh instrumen

r_2 = korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

3.3 Rancangan Pengujian hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini akan dimulai dengan penetapan hipotesis penelitian, pemilihan uji (*tes*) statistik untuk pengujian hipotesis, penetapan tingkat signifikansi (*significance level*), penerimaan dan penolakan Ho, dan penarikan kesimpulan.

3.3.1 Penetapan Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris.

Menurut **Nur indriantoro (2002 : 73)** bahwa :

"Pengujian hiotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap pengukuran kinerja."

Rumusan hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini adalah hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antara variabel definitive atau eksak sama dengan nol atau secara umum dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan (*signifikan*) antara variabel yang diteliti, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hubungan perbedaan (*signifikan*) antar variabel yag diteliti. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh dari akuntabiitas yang ditinjau dari konsep *good governance* terhadap kinerja pemerintah. Penjabaran atas hipotesis tersebut adalah :

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* terhadap kinerja Biro Humas, Protokol, dan Umum

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan atas akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* terhadap kinerja Biro Humas, Protokol, dan Umum.

3.4.2 Pemilihan Tes Statistik dan Perhitungan Nilai Tes Statistik

Tes yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan tes statistik non parametrik karena tes ini sesuai untuk tingkatan data ordinal dimana digunakan skor yang bukan skor eksak dalam pengertian keangkaan melainkan semata-mata merupakan tingkatan (*rank*) dan ukuran sampel yang kecil.

Dari beberapa teknis pengujian non parametik yang ada, penulis penggunakan teknik pengujian koefisien korelasi *rank spearman* dengan alasan penggunaan teknik ini merupakan ukuran asosiasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga objek-objek atau individu-individu yang dipelajari dapat diranking dalam dua ranking berturut-turut. Rumus *rank spearman* tersebut adalah sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6\sum di^2}{n(n^2 - 1)}$$

Di mana,

r_s = koefisien korelasi *rank spearman*

di^2 = selisih rangking data variabel x dan variabel y

n = banyaknya subjek yang diteliti

Jika ada observasi yang berangka sama digunakan faktor koreksi menurut *Siegel* adalah :

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Di mana,

T = faktor korelasi

t = banyaknya angka observasi yang berangka sama

maka rumus analisis korelasi *rank spearman* menjadi :

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum di}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

Di mana,

$$\sum x^2 = \frac{n(n^2-1)}{12} - \sum Tx$$

$$\sum y^2 = \frac{n(n^2-1)}{12} - \sum Ty$$

Sebagai panduan untuk menganalisa besar hubungan antara dua variabel yang diuji atau menetukan kuat lemahnya hubungan maka digunakan pedoman atau batasan-batasan yang dikemukan oleh Sugiyono (2006:183) sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai r	Indikasi
0,00 – 0,199	Hubungan yang sangat rendah
0,20 – 0,399	Hubungan yang rendah
0,40 – 0,599	Hubungan yang sedang
0,60 – 0,799	Hubungan yang kuat
0,80 – 1,00	Hubungan yang sangat kuat

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel x terhadap variabel y dalam presentase, digunakan rumus koefisien determinasi (Kd), yaitu :

$$Kd = r_s^2 \times 100\%$$

Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan rumus sebagai berikut:

Rumus uji t adalah

$$t = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}} \quad \text{jika n} > 30$$

Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan taraf 0,05 dan *degree of freedom* (n-k-1). Dengan kriteria :

H_o ditolak, jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_o diterima, jika : $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Gambaran umum mengenai karakteristik responden dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama kerja, dan jabatan dari karyawan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Ditinjau Dari Konsep *Good Governance* Terhadap Peningkatan Kinerja Biro Humas, Protokol, dan Umum. Berikut ini adalah tabel karakteristik responden yang menjadi objek penelitian.

1. Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Daftar responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	6	43%
Wanita	8	57%
Total	14	100%

Sumber :Data kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hasil data responden berdasarkan jenis kelamin pria sebanyak 6 orang (43%) dan wanita sebanyak 8 orang (57%).

2. Lama Kerja

Table 4.2

Daftar responden berdasarkan Lama kerja

Masa kerja	Jumlah	persentasi
1-10 tahun	2	14,2%
11-20 tahun	4	28.6%
Lebih dari 20 tahun	8	57,2%
Total	14	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan data di atas tampak bahwa karyawan Biro Humas, Umum, dan Protokol mempunyai kerja yang beragam di mana didominasikan oleh karyawan yang masa kerjanya diatas 20 tahun yaitu berjumlah 8 orang atau 57,2% dari total responden.

3. Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3

Daftar responden berdasarkan pendidikan terkhir

Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	2	14,2%
Diploma / D1	0	0,00%
Diploma 2/D2	0	0,00%
Diploma 3/D3	2	14,2%
Strata 1/S1	9	64,2%
Strata 2/S2	1	7,1%
Strata 3/S3	0	0,00%
Total	14	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Biro Humas, Protokol, dan Umum memiliki karyawan yang berpendidikan terakhir yang beragam. Karyawan Biro Humas, Umum, dan Protokol, didominasikan oleh lulusan strata I (S1) yaitu berjumlah 9 orang (64,2%). Sedangkan pendidikan terakhir SMA dan Diploma 3 berjumlah masing-masing 2 orang. Hal ini dikarenakan responden merupakan karyawan yang telah lama bekerja di Biro Humas, Protokol dan Umum di mana

pada saat penerimaan karyawan pada masa terakhir, pendidikan SMA dan Diploma sudah dirasakan cukup.

4.1.1 Deskripsi Tanggapan Responden

Sebelumnya dalam bab 3 telah dikemukakan bahwa untuk memperoleh data kuantitatif peneliti menggunakan daftar pernyataan (kuesioner). Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 14 orang responden di Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan keseluruhan variabel masing-masing terdiri dai 18 pernyataan untuk variabel X yang terdiri dari :

1. Akuntabilitas Keuangan : 10 Pernyataan
2. Akuntabilitas Manfaat : 5 Pernyataan
3. Akuntabilitas Prosedural : 5 Pernyataan

Dan 20 item pernyataan untuk variabel Y yang terdiri dari :

1. Efektifitas : 6 Pernyataan
2. Efisiensi : 4 Pernyataan
3. Pertumbuhan Karyawan : 5 Pernyataan
4. Kepuasan Pelanggan : 3 Pernyataan

Tanggapan responden terhadap variabel x akuntabilitas ditinjau dari *good governance* dapat dilihat dari jawaban kuesioner penelitian yang diperoleh dari hasil seperti yang terlihat pada tabel :

Tabel 4.4

Hasil kuesioner pengaruh akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance.*

Variable X

Rspd	Pernyataan																				Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	4	4	4	5	3	4	4	4	2	2	2	4	5	4	4	4	4	2	5	4	**74**
2	4	4	4	5	2	2	4	4	2	5	2	4	5	4	4	5	4	2	5	4	**75**
3	4	4	4	4	2	2	5	4	2	4	2	3	4	4	3	4	4	2	4	4	**69**
4	4	4	4	3	3	2	5	5	2	5	2	5	4	4	4	5	5	2	4	5	**77**
5	4	4	4	5	2	2	4	4	2	4	2	4	5	4	4	4	4	2	5	4	**73**

6	5	5	5	5	3	4	5	5	2	5	3	5	5	4	5	5	5	3	5	5	**89**
7	4	3	4	4	2	2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	**69**
8	4	4	4	5	2	5	5	5	3	5	4	5	5	5	4	5	4	3	5	5	**87**
9	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	3	4	5	5	4	4	5	4	5	5	**91**
10	5	5	4	3	2	2	4	4	3	4	2	5	4	4	4	5	5	2	4	5	**76**
11	3	4	3	2	2	3	4	4	2	4	2	2	4	3	3	3	4	2	4	4	**62**
12	4	5	4	5	3	3	5	4	4	5	3	5	5	4	4	5	5	4	5	4	**86**
13	4	4	4	4	2	2	4	4	2	4	2	3	4	4	4	4	4	2	4	4	**69**
14	4	4	4	4	2	2	4	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4	2	4	4	**68**

Table 4.5

Hasil terhadap peningkatan kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum

Variable Y

Rspd	**Pernyataan**																		**Jml**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	
1	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	**81**
2	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	**84**
3	4	3	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	**70**
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	**73**
5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	**80**
6	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	**82**
7	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	**73**
8	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	**74**
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	**88**
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	**71**
11	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	**64**
12	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	**81**
13	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	**79**
14	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	**69**

Berikut ini merupakan hasil tanggapan responden dari pernyataan kuesioner yang diajukan penulis tentang Akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance*

1. Akuntabilitas Keuangan

   Dalam indikator akuntabilitas keuangan , penulis mengembangkannya menjadi 10 pertanyaan, dari no 1-10. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel yaitu jawaban responden dari kuesioner disertai dengan perhitungan presentasenya :

Tabel 4.6

Variabel x dengan indikator akuntabilitas keuangan

Jawaban	Responden	Presentase
Sangat Setuju (SS)	34	24,2 %
Setuju (S)	62	44,2%
Netral (N)	15	10,7 %
Tidak Setuju (TS)	29	29,7%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	140	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil tanggapan responden atas pernyataan dari indikator akuntabilitas keuangan yaitu sebanyak 34 responden (24,2%) memberikan tanggapan sangat setuju dan 62 responden (44,2%) memberikan tanggapan setuju. Terdapat 15 responden (10,7 %) memberikan tanggapan netral dan terdapat 29 responden (29,7%) memberikan tanggapan tidak setuju. Hal ini menunjukkan, bahwa akuntabilitas keuangan di Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik.

2. Akuntabilitas Manfaat

Dalam indikator akuntabilitas manfaat, penulis mengembangkannya menjadi 5 pertanyaan dari no 11-15. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel yaitu jawaban responden dari kuesioner disertai dengan perhitungan presentasenya :

Tabel 4.7

Variabel x dengan indikator akuntabilitas manfaat

Jawaban	Responden	Presentase
Sangat Setuju (SS)	15	21,4%
Setuju (S)	35	50,0%
Netral (N)	9	12,8%
Tidak Setuju (TS)	11	15,8%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00%

Jumlah	70	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil tanggapan responden atas pernyataan dari indikator akuntabilitas manfaat yaitu sebanyak 15 responden (21,4%) memberikan tanggapan sangat setuju dan 35 responden (50,00%) memberikan tanggapan setuju. Terdapat 9 responden (12,8%) memberikan tanggapan netral dan terdapat 11 responden (15,8%) memberikan tanggapan tidak setuju . Hal ini menunjukkan, bahwa bahwa akuntabilitas manfaat di Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik.

3. Akuntabilitas Prosedural

Dalam indikator akuntabilitas procedural, penulis mengembangkannya menjadi 5 pertanyaan, dari no 16-20. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel yaitu jawaban responden dari kuesioner disertai dengan perhitungan presentasenya :

Tabel 4.8

Variabel x dengan indikator akuntabilitas procedural

Jawaban	Responden	Presentase
Sangat Setuju (SS)	23	32,8%
Setuju (S)	34	48,6%
Netral (N)	3	4,2%
Tidak Setuju (TS)	10	14,2%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	70	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil tanggapan responden atas pernyataan dari indikator akuntabilitas procedural yaitu sebanyak 23 responden (32,8%) memberikan tanggapan sangat setuju dan 34 responden (48,6%) memberikan tanggapan setuju. Terdapat 3 responden (4,2%) memberikan tanggapan netral dan terdapat 10 responden (14,2%) memberikan tanggapan tidak setuju. Hal ini

menunjukkan bahwa bahwa akuntabilitas prosedural di Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik. Berikut ini merupakan tanggapan responden tentang peningkatan kinerja pada Biro Humas, Protokol, dan umum

1. Efektivitas Kinerja

Dalam indikator efektivitas kinerja, penulis mengembangkannya menjadi 6 pertanyaan, dari no 21-26. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel yaitu jawaban responden dari kuesioner disertai dengan perhitungan presentasenya :

Tabel 4.9
Variabel y dengan indikator efektivitas kinerja

Jawaban	Responden	Presentase
Sangat Setuju (SS)	33	39,28%
Setuju (S)	45	53,57%
Netral (N)	6	7,14%
Tidak Setuju (TS)	0	0,00%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00%
Jumlah	84	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil tanggapan responden atas pernyataan dari indikator efektifitas kinerja yaitu sebanyak 33 responden (39,28%) memberikan tanggapan sangat setuju dan 45 responden (53,57%) memberikan tanggapan setuju. Terdapat 6 responden (7,14%) memberikan tanggapan netral hal ini menunjukan bahwa efektivitas kinerja Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik.

2. Efisiensi Kinerja

Dalam indikator efisiensi kinerja, penulis mengembangkannya menjadi 4 pertanyaan, dari no 27-30. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel yaitu jawaban responden dari kuesioner disertai dengan perhitungan presentasenya :

Tabel 4.10
Variabel y dengan indikator efisiensi kinerja

Jawaban	Responden	Presentase
Sangat Setuju (SS)	21	37,5%
Setuju (S)	35	63,5%
Netral (N)	0	0,00%
Tidak Setuju (TS)	0	0,00%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00%
Jumlah	56	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil tanggapan responden atas pernyataan dari indikator efisiensi kinerja yaitu sebanyak 21 responden (37,5%) memberikan tanggapan sangat setuju dan 35 responden (63,5%) memberikan tanggapan setuju. Hal ini menunjukan bahwa efisiensi kinerja Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik,

3. Pertumbuhan Karyawan

Dalam indikatorpertumbuhan karyawan, penulis mengembangkannya menjadi 5 pertanyaan, dari no 30-35. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel yaitu jawaban responden dari kuesioner disertai dengan perhitungan presentasenya :

Tabel 4.11
Variabel y dengan indikator pertumbuhan karyawan

Jawaban	Responden	Presentase
Sangat Setuju (SS)	18	25,72%
Setuju (S)	47	67,14%
Netral (N)	5	7,14%
Tidak Setuju (TS)	0	0,00%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00%
Jumlah	70	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil tanggapan responden atas pernyataan dari indikator pertumbuhan karyawan yaitu sebanyak 18 responden (25,72%) memberikan tanggapan sangat setuju dan 47 responden (67,14%) memberikan tanggapan setuju. Terdapat 5 responden (7,14%) memberikan tanggapan netral. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan karyawan Biro Humas, protokol, dan umum telah memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

4. Pelanggan

Dalam indikator pelanggan, penulis mengembangkannya menjadi 3 pertanyaan, dari no 36-38. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel yaitu jawaban responden dari kuesioner disertai dengan perhitungan presentasenya :

Tabel 4.12
Variabel y dengan indikator pelanggan

Jawaban	Responden	Presentase
Sangat Setuju (SS)	8	19,04%
Setuju (S)	27	64,28%
Netral (N)	6	14,28%
Tidak Setuju (TS)	1	2,38%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00%
Jumlah	42	100%

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil tanggapan responden atas pernyataan dari indikator pertumbuhan karyawan yaitu sebanyak 8 responden (19,04%) memberikan tanggapan sangat setuju dan 27 responden (64,28%) memberikan tanggapan setuju. Terdapat 6 responden (14,28%) memberikan tanggapan netral dan terdapat 1 responden (2,38%) memberikan tanggapan tidak setuju. Hal ini menunjukan bahwa kualitas layanan public terhadap kepuasan pelanggan telah sesuai dengan yang diharapkan.

4.2 Pengujian Data

Untuk menguji kualitas data kuesioner, penulis menggunakan instrumen kuesioner dengan uji validitas dan reabilitas. Pengujian validitas menggunakan *Pearson Moment*, dan dalam memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi item yang mempunyai korelasi positif dengan kriteria (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah bilar r hitung > r tabel.

Pengujian reabilitas instrumen dilakukan dengan *internal consistency* dengan menggunakan teknik belah dua (*split half*) yang dianalisis dengan rumus *Spearman Brown*, butir instrumen tersebut kemudian dibelah menjadi dua kelompok yaitu genap dan ganjil, kemudian dicari korelasinya dari skor total antara kelompok ganjil dan genap.

4.2.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui keandalan dari suatu data. Rumus yang digunakan dalam pengujian validitas yaitu menggunakan korelasi. *Pearson Moment*. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

a. Jika rxy hitung ≥ rtabel, maka pernyataan dinyatakan valid.
b. Jika rxy hitung > rtabel, maka pernyataan dinyatakan tidak valid.

Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 menunjukkan hasil perhitungan tingkat validitas dari variabel independen dan variabel dependen dengan bedasarkan jawaban dari kuesioner yang disebarkan penulis kepada 14 responden sehingga diperoleh rtabel adalah 0,576.

Tabel 4.13
Uji validitas variabel independen
(Variabel X =Pengaruh akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good governance*)
r tabel (df=12, α= 0,05)

Variabel X	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
1	0,674	0,576	valid
2	0,666	0,576	valid
3	0,760	0,576	valid
4	0,616	0,576	valid

5	0,634	0,576	valid
6	0,702	0,576	valid
7	0,713	0,576	valid
8	0,729	0,576	valid
9	0,690	0,576	valid
10	0,586	0,576	valid
11	0,811	0,576	valid
12	0,722	0,576	valid
13	0,705	0,576	valid
14	0,724	0,576	valid
15	0,679	0,576	valid
16	0,647	0,576	valid
17	0,669	0,576	valid
18	0,838	0,576	valid
19	0,705	0,576	valid
20	0,686	0,576	valid

Sumber : Kuesioner Penelitian

Dari Tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa dari 20 item pernyataan yang diajukan, semuanya dinyatakan *valid*.

Tabel 4.14
Uji validitas variabel dependen
(Variabel Y =Peningktan kinerja)
r tabel (df=12, α=0,05)

Variabel Y	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
1	0,647	0,576	Valid
2	0,633	0,576	Valid
3	0,699	0,576	Valid
4	0,711	0,576	Valid
5	0,581	0,576	Valid
6	0,683	0,576	Valid
7	0,595	0,576	Valid
8	0,783	0,576	Valid
9	0,669	0,576	Valid
10	0,595	0,576	Valid
11	0,581	0,576	Valid
12	0,628	0,576	Valid
13	0,639	0,576	Valid
14	0,675	0,576	Valid
15	0,779	0,576	Valid

16	0,696	0,576	Valid
17	0,675	0,576	Valid
18	0,711	0,576	Valid

Sumber : Kuesioner Penelitian

Dari Tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa dari 18 item pernyataan yang diajukan, semuanya dinyatakan *valid*.

4.2.2 Pengujian Reabilitas

Setelah diuji keabsahannya, item-item dalam penelitian ini tentunya harus diuji keandalannya. Pengujian reabilitas dilakukan dengan mengelompokkan skor total butir bernomor ganjil sebagai belahan pertama (Tabel 4.15) dan kelompok skor total butir bernomor genap sebagai belahan kedua (Tabel 4.16). Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15

Uji Reabilitas

Data untuk pernyataan ganjil

Resp	**Pernyataan**																			**Jumlah**
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	
1	4	4	3	4	2	2	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	**78**
2	4	4	2	4	2	2	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	**78**
3	4	4	2	5	2	2	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	**69**
4	4	4	3	5	2	2	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	**74**
5	4	4	2	4	2	2	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	**77**
6	5	5	3	5	2	3	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	**83**
7	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	**70**
8	4	4	2	5	3	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	**78**
9	5	5	3	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	**88**
10	5	4	2	4	3	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**73**
11	3	3	2	4	2	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	**65**
12	4	4	3	5	4	3	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	**84**
13	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	**74**
14	4	4	2	4	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	**68**
Total	**58**	**57**	**33**	**62**	**34**	**33**	**63**	**54**	**61**	**63**	**63**	**59**	**63**	**62**	**60**	**58**	**59**	**63**	**54**	**1059**

Sumber : Kuesioner Penelitian

Tabel 4.16

Uji Reabilitas

Data Untuk pertanyaan genap

Resp	Pernyataan																			Jumlah
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	
1	4	5	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	**77**
2	4	5	2	4	5	4	4	5	2	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	**81**
3	4	4	2	4	4	3	4	4	2	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	**70**
4	4	3	2	5	5	5	4	5	2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	**76**
5	4	5	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	**76**
6	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	**88**
7	3	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	**72**
8	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	**83**
9	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	**91**
10	5	3	2	4	4	5	4	5	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	**74**
11	4	2	3	4	4	2	3	3	2	4	4	3	3	4	4	4	3	3	2	**61**
12	5	5	3	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	**83**
13	4	4	2	4	4	3	4	4	2	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	**74**
14	4	4	2	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	**69**
Total	**59**	**59**	**40**	**60**	**59**	**57**	**57**	**61**	**34**	**61**	**61**	**57**	**60**	**61**	**62**	**59**	**54**	**56**	**58**	**1075**

Sumber : Kuesioner Penelitian

Kemudian data ganjil dan genap dikorelasikan seperti yang dijabarkan dalam Tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17

Korelasi pernyataan ganjil dan genap

No. Respd	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	78	77	6084	5929	6006
2	78	81	6084	6561	6318
3	69	70	4761	4900	4830
4	74	76	5476	5776	5624
5	77	76	5929	5776	5852
6	83	88	6889	7744	7304
7	70	72	4900	5184	5040
8	78	83	6084	6889	6474
9	88	91	7744	8281	8008
10	73	74	5329	5476	5402
11	65	61	4225	3721	3965
12	84	83	7056	6889	6972
13	74	74	5476	5476	5476
14	68	69	4624	4761	4692

Jumlah	**1059**	**1075**	**80661**	**83363**	**81963**

$$r_b = r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_b = \frac{14 \times 81963 - 1059 \times 1075}{\sqrt{(14 \times 80661 - 1059^2)(14 \times 83363 - 1075^2)}}$$

$$r_b = \frac{9057}{9436,9}$$

$$= 0,959$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui besarnya korelasi antara x (belahan ganjil) dan y (belahan genap) adalah sebesar 0,959

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

$$= \frac{1,918}{1,959}$$

$$= 0,979$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa $r_{tabel} = 0,576$, maka $r_i > r_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan instrumen yang digunakan dalam penelitian *reliabel* sebesar 97%.

4.2.3 Analisis Koefisiensi Korelasi *Rank Spearman*

Untuk mengetahui apakah Pengaruh Akuntabilitas Ditinjau dari Konsep *Good Governance* Terhadap Peningkatan Kinerja telah memadai atau tidak, maka penulis menggunakan analisis korelasi *rank spearman*.

Untuk mengetahui koefisien korelasi *rank spearman* maka digunakan rumus:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum di^2}{n(n^2 - 1)}$$

Di mana :

r_s = koefisien korelasi *rank spearman*

$\sum di^2$ = jumlah kuadrat dari selisih ranking antara 2 variabel

n = jumlah responden

Sebelum memakai rumus di atas terlebih dahulu harus ditentukan rangking dari skor perhitungan kuesioner masing-masing variabel. Rangking atas skor perhitungan masing-masing variabel dapat dilihat pula pada tabel berikut :

Tabel 4.18

Tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi *rank spearmant*

Responden	X	Y	rank X	rank Y	di	di^2
A	74	81	8	4,5	3,5	12,25
B	75	84	7	2	5	25
C	69	70	11	12	-1	1
D	77	73	5	9,5	4,5	20,25
E	73	80	9	6	3	9
F	89	82	2	3	-1	1
G	69	73	11	9,5	1,5	2,25
H	87	74	3	8	5	25
I	91	88	1	1	0	0
J	76	71	6	11	-5	25
K	62	64	14	14	0	0
L	86	81	4	4,5	0,5	0,25
M	69	79	11	7	4	16
N	68	69	13	13	0	0
Total	**1065**	**1069**	**105**	**105**	**0**	**137**

$$r_s = 1 - \frac{6\sum di^2}{n(n^2-1)}$$

$$r_s = 1 - \frac{6(137)}{14(14^2-1)}$$

$$r_s = 1 - \frac{822}{2730}$$

$$r_s = 1 - 0{,}3010$$

$$r_s = 0{,}699$$

Koefisien korelasi *rank spearman* antara variabel x dan variabel y yang didapat dari hasil perhitungan di atas adalah 0,699, karena dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat rangking dalam angka kembar, maka perhitungan r_s digunakan faktor korelasi sebagai berikut:

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Di mana :

t = jumlah angka kembar dari sampel penelitian

T = faktor korelasi

Tabel 4.19

Angka kembar

Variabel independen (X)

X	t	t^3	$t^3 - t$	T
69	3	27	24	2
Total	3	27	24	2

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat faktor koreksi untuk variabel x adalah $\sum T_X = 2$.

Tabel 4.20

Angka kembar

Variabel dependen (Y)

Y	t	t^3	$t^3 - t$	T
81	2	8	6	0,5
73	2	8	6	0,5
Total	4	16	12	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat besarnya faktor koreksi untuk variabel y adalah: $\sum T_y = 1$.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dihitung jumlah kuadrat untuk variabel x yaitu sebagai berikut :

$$\sum x^2 = \frac{n(n^2 - 1)}{12} - \sum Tx$$

$$\sum x^2 = \frac{14(14^2 - 1)}{12} - 2$$

$$\sum x^2 = \frac{2730}{12} - 2$$

$$\sum x^2 = 225{,}5$$

Sedangkan untuk variabel y adalah:

$$\sum y^2 = \frac{n(n^2-1)}{12} - \sum Ty$$

$$\sum y^2 = \frac{14(14^2-1)}{12} - 1$$

$$\sum y^2 = \frac{2730}{12} - 1$$

$$\sum y^2 = 226{,}5$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui nilai koefisien korelasi *spearmant* sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum di}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$r^s = \frac{225{,}5 + 226{,}5 - 137}{2\sqrt{(225{,}5)(226{,}5)}}$$

$$r^s = \frac{315}{451{,}9}$$

$$r_s = 0{,}697$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi *spearmant* diperoleh nilai sebesar 0,697. Nilai tersebut dalam pedoman interpretasi koefisian korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kedua variabel. Hasil penghitungan yang positif menandakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang searah. Artinya apabila Akuntabilitas yang ditinjau dari konsep *Good Governance* dilaksanakan dengan baik, maka kinerja organisasi akan meningkat.

4.2.4 Analisis Koefisiensi Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat besarnya pengaruh Akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance* terhadap peningktan kinerja, yaitu:

$$Kd = r_s \text{ x } 100\%$$

$$Kd = 0{,}697^2 \text{ x } 100\%$$

$$Kd = 48{,}58\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka besarnya pengaruh akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance* terhadap Kinerja Biro Humas, Umum, dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 48,58%, sedangkan sisanya sebesar 51,42% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance*. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Biro Humas, Umum, dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4.2.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis statistik yang ditetapkan adalah :

HO : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance* terhadap peningkatan kinerja Biro Humas, Umum dan Protokol.

HI : Terdapat pengaruh yang signifikan atas akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance* terhadap peningkatan kinerja Biro Humas, Umum dan Protokol.

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, kita harus menghitung uji signifikansi t kemudian membandingkannya dengan nilai t_{tabel}. Nilai t dihitung dengan rumus :

$$t = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^{\,2}}}$$

$$t = 0{,}697 \sqrt{\frac{14-2}{1-(0{,}697)^2}}$$

$$t = 3{,}367$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka didapat t_{hitung} = 3,367, kemudian dibandingkan dengan t_{tabel}. Untuk mencari t_{tabel} diperlukan tabel nilai distribusi t yang dapat dilihat pada lampiran, dengan rumus df = n-2 diperoleh df = 14-2 = 12, tingkat signifikan α untuk uji dua pihak (*two tailed test*) = 0.05, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,782. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,367 > 1,782) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan atas Akuntabilitas Ditinjau Dari Konsep *Good Governance* Terhadap Kinerja Dinas Biro Humas, Protokol dan Umum provinsi Jawa Barat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Akuntabilitas Ditinjau dari Konsep *Good Governance*

Akuntabilitas sebagai elemen terpenting dalam prinsip *good governance* dapat dikatakan sebagai suatu pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure)* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, karena akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi suatu organisasi yang bersangkutan.

Akuntabilitas sebagai elemen terpenting dalam prinsip *good governance* dapat dikatakan sebagai suatu pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure)* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, karena akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi suatu organisasi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum adalah instrument pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi

pemerintah dalam pertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi.

Asas yang diterapkan pada Biro Humas, protokol dan Umum ini asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur yang tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan antara hak asasi, golongan dan rahasia negara. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan untuk melihat akuntabilitas efisiensi kebijakan program untuk meminimalkan prosedur yang tidak diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja.

Penerapan akuntabilitas pada Biro Humas, Protokol dan Umum pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan pernerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi.

Akuntabilitas ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat sebagai pemberi mandat dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping media pertanggungjawaban laporan akuntabilitas merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum yang dijadikan *feed back* untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sasaran kegiatan Biro Humas, Protokol dan Umum adalah terlayaninya seluruh permintaan/kebutuhan pelayanan atas kebutuhan jasa administrasi perkantoran, penyedia jasa sarana dan prasarana kerja, pelayanan informasi, guna menunjang kelancaran tugas pimpinan dan aparatur

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* yang terdapat di Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat yang peneliti tinjau dari segi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural telah berjalan baik dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya.

Adapun pembahasan mengenai Akuntabilitas Ditinjau dari Konsep *Good Governance* sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan

Dari hasil pengolahan data penilaian terhadap jawaban kuesioner dari 14 responden mengenai akuntabilitas keuangan, diperoleh hasil persentase sebesar 24,2% menyatakan sangat setuju, 44,2% setuju, 10,7% netral, 29,7% tidak setuju dan 0% sangat tidak setuju. Dapat dilihat bahwa persentase terbesar terdapat pada pernyataan responden setuju, hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas keuangan yang meliputi integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat sudah baik dilaksanakan, dimana pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas keuangan sangat diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya. Dan hal ini dapat terlihat dari laporan informasi keuangan yang disajikan secara trasnparan, lengkap dan jelas mulai dari perolahan sumber dana dan penggunaanya, sehinnga dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Apabila diperlukan pengelolaan dana dapat di informasikan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga tingkat pertanggungjawaban tersebut dapat diandalkan. Laporan keuangan berupa penggunaan anggaran dan kemajuan fisik selalu dibuat dan disajikan secara periodik serta dialokasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat diandalkan bagi pembuat keputusan agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan. Dan dengan adanya proses audit dalam sistem pelaporan dan akuntansi yang dilakukan oleh auditor, baik internal, maupun eksternal, hal ini memperkuat bahwa tingkat pertanggungjawaban di Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat telah memadai.

2. Akuntabilitas Manfaat

Dari hasil pengolahan data penilaian terhadap jawaban kuesioner dari 14 responden mengenai akuntabilitas manfaat, diperoleh hasil persentase sebesar 21,4% menyatakan sangat setuju, 50,00% setuju, 12,8% netral, 15,8% tidak setuju dan 0% sangat tidak setuju. Dapat dilihat bahwa persentase terbesar terdapat pada pernyataan responden setuju, hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas manfaat

yang dilaksanakan oleh Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat sudah baik dilaksanakan, dimana pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas manfaat sangat diperlukan dalam aktivitas organisasinya. Dapat dilihat bahwa hasil kegiatan/ program yang dilaksanakan selalu mengalami peningkatan tiap tahun, dimana adanya pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi terhadap hasil kegiatan/ program tersebut, sehingga kegiatannya telah berjalan dengan tujuan organisasi. Dan pelaporan terhadap hasil tersebut telah dilakukan secara tepat waktu dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.

3. Akuntabilitas Prosedural

Dari hasil pengolahan data penilaian terhadap jawaban kuesioner dari 14 responden mengenai akuntabilitas prosedural diperoleh hasil persentase sebesar 32,8% menyatakan sangat setuju, 48,6% setuju, 4,2% netral, 14,2% tidak setuju dan 0% sangat tidak setuju. Dapat dilihat bahwa persentase terbesar terdapat pada pernyataan responden sangat setuju hal ini menggambarkan bahwa akuntabiltias prosedural yang dilaksanakan oleh Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat sudah baik dilaksanakan, dimana pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas prosedural sangat diperlukan dalam aktivitas organisasi. Dan dapat dilihat dari ketetapan kebijakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004, dan UU No.33 Tahun 2004) dan pelaksanaan program kerjanya selalu menjadi prioritas utama, dan sesuai dengan nilai etika, kepastian hukum yang berlaku, serta ketaatan kepada keputusan politis. Dan adanya kegiatan sertifikasi, standarisasi, dan inspeksi, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

4.3.2 Kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat

Pada hasil pengumpulan data yang didapat dari kuesioner**,** pengamatan, maupun wawancara maka kinerja Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat, yang ditinjau dari efektivitas, efisiensi, pertumbuhan karyawan, dan kepuasan pelanggan, maka dapat disimpulkan bahwa Biro humas,

Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat memiliki kinerja yang sudah baik dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya

Adapun pembahasan mengenai pengukuran kinerja pada Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Dari hasil pengolahan data penilaian terhadap jawaban kuesioner dari 14 responden mengenai Efektivitas atas kuesioner penelitian diperoleh hasil persentase sebesar 39,28% menyatakan sangat setuju, 53,57% setuju, 7,14% netral, 0% menyatakan tidak setuju. Dapat dilihat bahwa persentase terbesar terdapat pada pernyataan responden setuju, hal ini menggambarkan bahwa kinerja Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat sudah baik dan efektif dilaksanakan, dimana efektivitas kinerja Biro humas, Protokol dan Umum dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatannya yang meliputi, pelayanan informasi yang meningkat setiap tahun, kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan selalu terpenuhi, kualitas pelayanan keprotokolan terhadap pimpinan dan tamu Pemprov Jabar meningkat setiap tahun, pelayanan administrasi negara dilaksanankan secara optimal dan penyelenggaraan pelayanan peningkatan saranan dan prasarana kantor dilaksanakan secara optimal.

2. Efisiensi

Dari hasil pengolahan data penilaian terhadap jawaban kuesioner dari 14 responden mengenai efisiensi atas kuesioner penelitian diperoleh hasil persentase sebesar 37,5% menyatakan sangat setuju, 63,5% setuju dan 0% meyatakan tidak setuju. Dapat dilihat bahwa persentase terbesar terdapat pada pernyataan responden setuju hal ini menggambarkan bahwa efisiensi Biro humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat sudah baik dan efisien dilaksanakan, dimana program dan kegiatan yang dihasilkan dapat dicapai dengan program penggunaan sumber daya aparatur yang sekecil mungkin, serta pengalokasian anggaran belanja antara alokasi dan realisasi memberikan hasil yang efisien

3. Pertumbuhan Karyawan

Dari hasil pengolahan data penilaian terhadap jawaban kuesioner dari 14 responden mengenai pertumbuhan karyawan atas kuesioner penelitian diperoleh hasil persentase sebesar 25,72% menyatakan sangat setuju, 67,14 setuju, 7,14 netral dan 0% menyatakan tidak stuju. Dapat dilihat bahwa persentase terbesar terdapat pada pernyataan responden setuju hal ini menggambarkan bahwa Pertumbuhan pegawai Biro humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat sudah tumbuh dengan baik, dimana masing-masing pegawai diberikan pelatihan dan pengembangan dalam berbagai kesempatan, sehingga para pegawai mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki

4. Kepuasan Pelanggan

Dari hasil pengolahan data penilaian terhadap jawaban kuesioner dari 14 responden mengenai kepuasan pelanggan atas kuesioner penelitian diperoleh hasil persentase sebesar 19,04% menyatakan sangat setuju, 64,28% setuju, 14,28% netral, 2,38% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Dapat dilihat bahwa persentase terbesar terdapat pada pernyataan responden setuju hal ini menggambarkan pelayanan terhadap masyarakat sudah baik dilaksankan oleh Biro humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat, dimana tersedianya sarana dan fasilitas yang mampu menampung dan memfasilitasi keluhan masyarakat.

4.3.3 Pengaruh Akuntabilitas ditinjau dari *Good Governance* terhadap Peningkatan Kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Sekda Provinsi Jawa Barat

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat,. Jika dalam penerapan dan pelaksanaan pertanggungjawaban mengenai sumber-sumber dan penggunaan dana, pencapaian hasil suatu program / kegiatan, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka penilaiian terhadap kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat,dapat dinilai telah sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa antara akuntabilitas dengan kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat terdapat korelasi *r* sebesar 0,649 dimana berdasarkan pedoman interpretasi korelasi, *r* = 0,697 berada dalam interval 0,60-0,799 yang menunjukkan tingkat hubungan yang kuat (**Sugiyono, 2009:184**). Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien determinasi adalah *r* dikuadratkan dan dikalikan 100%. Dari hasil perolehan koefisien determinasi tersebut diperoleh nilai sebesar 48,58%, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja Biro Humas, Umum, dan Protokol Sekda Provinsi Jawa Barat sebesar 48,58%, sedangkan sisanya sebesar 51,42% dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih dominan

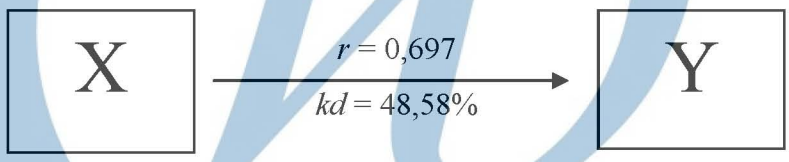

Gambar 4.1
Korelasi Akuntabilitas Ditinjau dari Konsep *Good Governance* Terhadap Pengukuran Peningkatan Kinerja Biro Humas, Umum, dan Protokol Sekda Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan penelitian diatas dapat kita lihat bahwa akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* terhadap peningkatan kinerja Biro Humas, Umum dan Protokol dalam pengujian koefisien korelasi dilakukan uji hipotesis, dari hasil penggujian tersebut terlihat bahwa t_{hitung} 3,367 lebih besar dari t_{tabel} 1,728. ini berarti dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* terhadap Peningkatan Kinerja Biro Humas, Umum dan Protokol, sehingga hipotesis yang peneliti kemukakan ”**Akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Biro Humas, Umum dan Protokol”** dapat diterima.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan dan memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas ditinjau dari konsep *Good Governance* terhadap peningkatan kinerja pada Biro Humas, Umum, dan Protokol Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner yang diisi oleh 14 responden menunjukan bahwa rata-rata skor yang diperoleh responden adalah 87,63%.
2) Pengukuran peningkatan kinerja pada Biro Humas, Umum, dan Protokol Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu organisasi pemerintah telah berjalan dengan sangat baik. Hal Ini terlihat dari hasil perhitungan terhadap kuesioner 14 orang responden mengenai kinerja Biro Humas, Umum, dan Protokol Provinsi Jawa Barat maka diperoleh rata rata skor sebesar 84,33 %.
3) Akuntabilitas ditinjau dari konsep Good Governance terbukti berpengaruh positif terhadap pengukuran kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi *rank spearman* sebesar 0,697

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan jadi masukan yang berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1) Bagi Biro Humas, Umum, dan Protokol

Akuntabilitas ditinjau dari konsep *good governance* di Biro Humas, Umum, dan Protokol

a. Akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh Biro Humas, Umum, dan Protokol Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik oleh karena itu perlu dipertahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan lagi bukan hanya bagi pimpinan saja sebagai responden dalam penelitian ini tetapi juga bawahannya yang tidak menjadi responden. Diharapkan semua sumber daya manusia yang ada di Biro Humas, Umum, dan Protokol Provinsi Jawa Barat mampu menerapkan akuntabilitas lebih baik lagi di kemudian hari.

b. Pimpinan yang ada di Biro Humas, Protokol dan Umum

Harus menunjukan komitmen yang serius dalam mengembangkan nilai – nilai akuntabilitas dalam organisasi. Hal ini harus dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran bagi semua jajaran pimpinan sub unit organisasi dan pegawai akan pentingnya manfaat akuntabilitas yang akan diperoleh.

Pengukuran Kinerja Biro Humas, Umum dan Protokol

a. Kinerja organisasi yang dijalankan di Biro Humas, Umum, dan Protokol Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik oleh karena itu perlu dipetahankan dan bila perlu lebih ditingkatkan lagi guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Tujuan dan sasaran organisasi yang belum tercapai pada tahun ini diharapkan dapat segera terwujud ditahun mendatang dengan adanya jalinan kerja sama yang lebih baik lagi antara pimpinan dan bawahan.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti di organisasi pemerintahan lainnya, guna mengetahui lebih jauh apakah organisasi pemerintah pada umumnya telah melaksanakan Akuntabilitas seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah dalam mengetahui keberhasilan, kegagalan dan pertanggungjawaban yang ada di organisasi pemerintah tersebut. Peneliti selanjutnya juga dapat lebih memperluas variabel penelitiannya, dan jumlah serta, sampelnya.

DAFTAR PUSTAKA

Indra bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga

LAN dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance,* Lembaga Administrasi Negara dan BPK, Jakarta.

LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Lembaga Administrasi Negara dan BPK, Jakarta.

LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*, Lembaga Administrasi Negara dan BPK, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik* : Penerbit Andi Yogyakarta

Moh. Nazir,2003, *Metode Penelitian* : Penerbit Ghalia Indonesia

Rosjidi, 2001, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah* : Kerangka, Standard dan Metode, Aksara Satu, Surabaya.

Sudjana, 1997, *Statiska Untuk Ekonomi Dan Niaga II Edisi Baru* : Penerbit Tarsito Bandung.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitaian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Alfabeta : Bandung.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Keuangan bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance.* Yogyakarta: Balairung.

Tunggal, Imam Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal. 2002. *Membangun Good Corporate Governance*. Jakarta: Harvindo

Whittaker JB, 1996, *The Government Performance and Result Act of 1993,* Washington DC, GAO.

Widodo Joko, 2001, *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, Surabaya.

Internet:

www.bpkp.go.id
www.google.com
www.wikipedia.com. The free encyclopedia